

LAKUKAN PENGAWASAN MUDIK, OMBUDSMAN JAMBI: MODA TRANSPORTASI PERAIRAN BUTUH BANYAK PERBAIKAN

Selasa, 17 Maret 2026 - jambi

Siaran Pers

Nomor : 0004/HM.01-06/III/2026

Selasa, 17 Maret 2026

JAMBI - Selama sepekan lebih, Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Jambi telah melakukan pengawasan terhadap arus mudik jelang Lebaran di Provinsi Jambi. Ombudsman mengambil sampel pengawasan yang ada di Kota Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Ada beberapa moda transportasi yang diawasi oleh Ombudsman yakni, angkutan darat, perairan dan udara.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman Jambi, Abdul Rokhim, menjelaskan bahwa ada sejumlah titik pengawasan yang dikunjungi oleh Ombudsman. Lokasi tersebut yakni Pelabuhan LSDP Kuala Tungkal, Pelabuhan Penyeberangan Roro Kuala Tungkal, Terminal Alam Barajo Kota Jambi, Pelabuhan Tanggo Rajo Jambi serta Bandara Sultan Thaha Jambi.

"Kita juga melakukan koordinasi dengan pihak penyelenggara di daerah, seperti Dinas Perhubungan, UPT Kementerian PU, Syahbandar dan juga PT Angkasa Pura," ujar Rokhim pada Selasa (17/3/2026).

Rokhim menjelaskan bahwa Ombudsman RI telah memerintahkan untuk melakukan pengawasan terhadap pelayanan publik di bidang transportasi selama musim mudik Lebaran, termasuk Provinsi Jambi. Untuk itu, selama sepekan ini, Ombudsman Jambi lewat Keasistenan Pencegahan Maladministrasi melakukan pengawasan di sejumlah kawasan. Pengawasan yang dilakukan meliputi sarana dan prasarana pendukung layanan transportasi selama mudik.

Dari hasil pengawasan Ombudsman, sejauh ini tidak ada kendala berarti terhadap pelayanan yang diberikan kepada masyarakat selama mudik berlangsung, namun demikian Ombudsman tetap mencatat beberapa hal yang menjadi perbaikan untuk layanan transportasi ke depannya.

Rokhim menyampaikan bahwa untuk transportasi perairan di Jambi, masih perlu perbaikan dalam hal prasarana pendukung yang menunjang keamanan dan keselamatan penumpang. Ia mengamati bahwa belum ada sistem pengawasan dan pengamanan terpadu pada angkutan perairan bagi penumpang.

"Kita lihat petugas masih minim di pelabuhan yang kita awasi. Selain itu, tidak adanya sistem pengaturan bagasi yang memadai sebelum masuk kapal, berbeda dengan pesawat. Sehingga bisa meminimalisir risiko," sebut Rokhim.

Selain itu, diperlukan juga pemeriksaan berkala terhadap kondisi kapal, baik mesinnya maupun pengemudi kapal atau

nahkoda. Rokhim menyampaikan bahwa perlu ada pemeriksaan berkala terhadap operator angkutan perairan untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan masyarakat.

"Kami mendorong agar perhatian Pemerintah Pusat maupun Daerah terhadap angkutan perairan di Jambi untuk lebih ditingkatkan lagi. Jadi tidak hanya angkutan darat dan udara saja yang diperhatikan, tapi perairan juga," tegas Rokhim.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi

Abdul Rokhim

0853-8182-8012